

Analisis Pemahaman Siswa Tentang Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia di SMP Negeri 5 Kota Sorong

Musa Rayar¹, Aldila Yulia W.S²., Ernawati Simatupang³

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

musaraya14@gmail.com, aldillayulia@unimudasorong.ac.id, ernawatisimatupang@unimudasorong.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman siswa SMP Negeri 5 Kota Sorong tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta siswa kelas VII, VIII, dan IX SMP Negeri 5 Kota Sorong. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara masih berada pada tingkat pemahaman teoritis dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari. Sebagian siswa telah memahami hak memperoleh pendidikan, kebebasan berpendapat, dan kewajiban menaati peraturan sekolah, namun implementasinya masih belum optimal. Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman siswa meliputi faktor internal seperti kesadaran diri dan motivasi belajar, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, metode pembelajaran guru, dan pengaruh teman sebaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran PPKn perlu dikembangkan secara kontekstual dan berbasis pembentukan karakter agar siswa tidak hanya memahami konsep hak dan kewajiban secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Pemahaman Siswa, Hak dan Kewajiban, Warga Negara, PPKn

Abstract

This study aims to analyze students' understanding of their rights and obligations as Indonesian citizens at SMP Negeri 5 Sorong City and the factors influencing this understanding. The study employed a descriptive qualitative approach with a phenomenological approach. Subjects included the principal, Pancasila and Citizenship Education (PPKn) teachers, and seventh, eighth, and ninth grade students at SMP Negeri 5 Sorong City. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that students' understanding of their rights and obligations as citizens remains at a theoretical level and has not been fully internalized in their daily behavior. Some students understand the right to education, freedom of expression, and the obligation to obey school regulations, but their implementation is still suboptimal. Factors influencing student understanding include internal factors such as self-awareness and learning motivation, as well as external factors such as family environment, school environment, teacher teaching methods, and peer influence. This study concludes that PPKn learning needs to be developed contextually and based on character building so that students not only understand the concept of rights and obligations theoretically, but are also able to apply them in everyday life.

Keywords: student understanding, rights and obligations, citizens, PPKn

A. Latar Belakang

Hak dan kewajiban merupakan dua unsur fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai warga negara, setiap individu memiliki hak yang dijamin oleh negara sekaligus kewajiban yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab (Asshiddiqie, 2011). Dalam konteks kehidupan demokratis, hubungan antara hak

dan kewajiban menjadi dasar terciptanya keseimbangan sosial, ketertiban hukum, serta partisipasi warga negara dalam pembangunan bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah memberikan landasan konstitusional yang kuat mengenai hak dan kewajiban warga negara, di antaranya melalui Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan

yang sama di depan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak dan kewajiban memiliki hubungan timbal balik yang harus dipahami dan dilaksanakan secara seimbang oleh setiap warga negara (Tutik, 2018).

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, sikap, serta kesadaran peserta didik sebagai bagian dari warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), siswa tidak hanya diharapkan memahami konsep-konsep konstitusional mengenai hak dan kewajiban secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Daryanto, 2013). Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya bertujuan membentuk warga negara yang baik (*good citizen*), yakni individu yang memahami hak-haknya, melaksanakan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya (Narwanti, 2011).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban warga negara masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak siswa yang memahami konsep hak dan kewajiban hanya sebatas materi pelajaran tanpa mampu menghubungkannya dengan praktik kehidupan sehari-hari. Kondisi ini terlihat dari berbagai perilaku siswa yang masih kurang mencerminkan kesadaran sebagai warga negara muda, seperti kurang disiplin terhadap tata tertib sekolah, rendahnya rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, kurang menghormati hak orang lain, serta belum optimalnya partisipasi siswa dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan

di lingkungan sekolah (Asshiddiqie, 2011). Di sisi lain, sebagian siswa lebih cenderung menuntut hak tanpa diimbangi kesadaran untuk menjalankan kewajiban secara seimbang. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan implementasi nyata nilai-nilai kewarganegaraan (Tutik, 2018).

Dalam konteks sekolah, pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban sangat penting karena sekolah merupakan miniatur kehidupan sosial yang menjadi tempat awal pembentukan karakter kewarganegaraan. Siswa tidak hanya berperan sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai warga negara muda yang sedang belajar menjalankan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Syuhud Mujahada & Rohmatullah, 2025). Hak siswa, seperti memperoleh pendidikan, perlindungan, lingkungan belajar yang aman, serta kesempatan menyampaikan pendapat, harus berjalan beriringan dengan kewajiban menaati aturan sekolah, menghormati guru dan teman, menjaga fasilitas sekolah, serta mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban harus ditanamkan secara sadar agar terbentuk sikap demokratis dan tanggung jawab sosial pada diri siswa (Budimansyah, 2008).

SMP Negeri 5 Kota Sorong sebagai salah satu lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan siswa melalui pembelajaran PPKn dan budaya sekolah. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa sebagian siswa masih menunjukkan perilaku yang belum mencerminkan implementasi pemahaman hak dan kewajiban secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya siswa yang datang terlambat ke sekolah, kurang menjaga kebersihan lingkungan kelas, tidak menaati tata tertib sekolah secara konsisten, serta kurang aktif dalam kegiatan yang mencerminkan tanggung jawab sosial. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa

pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban warga negara masih cenderung bersifat teoritis dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari (Tutik, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban warga negara sering kali masih berada pada tataran kognitif semata. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa siswa umumnya mampu menjelaskan konsep hak dan kewajiban secara verbal, tetapi mengalami kesulitan dalam menerapkannya dalam situasi nyata. Selain itu, terdapat faktor-faktor tertentu yang memengaruhi tingkat pemahaman siswa, baik faktor internal seperti motivasi belajar dan kesadaran diri, maupun faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, metode pembelajaran guru, serta pengaruh teman sebaya (Safira, 2025). Dengan demikian, penting dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana siswa memaknai hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka (Nur et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemahaman siswa SMP Negeri 5 Kota Sorong mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran PPKn yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis pembentukan karakter sehingga siswa tidak hanya memahami hak dan kewajiban secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Arne, 2025).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini

dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah (Murdiansyah et al., 2025). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pengalaman, persepsi, dan pemaknaan siswa terhadap konsep kewarganegaraan yang dipelajari dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengalaman sadar individu terhadap suatu fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Pendekatan fenomenologis dipilih karena mampu membantu peneliti menggali makna yang dibangun siswa berdasarkan pengalaman mereka selama berada di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari (Yusanto, 2020).

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 5 Kota Sorong. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah tersebut memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kesadaran kewarganegaraan siswa. Selain itu, berdasarkan observasi awal ditemukan masih adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis siswa tentang hak dan kewajiban dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti kurang disiplin terhadap aturan sekolah dan rendahnya partisipasi sosial siswa. Penelitian dilakukan selama kurang lebih tiga bulan yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan karena tidak semua pihak memiliki informasi

yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru PPKn, dan siswa kelas VII, VIII, serta IX. Kepala sekolah dipilih karena memiliki peran dalam menentukan kebijakan sekolah terkait pembentukan karakter siswa. Guru PPKn dipilih karena terlibat langsung dalam proses pembelajaran materi hak dan kewajiban warga negara. Sementara itu, siswa dipilih sebagai subjek utama karena mereka merupakan pihak yang mengalami langsung proses pembelajaran dan penerapan nilai-nilai kewarganegaraan di sekolah (Suriani & Jailani, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk melihat perilaku siswa, proses pembelajaran PPKn, serta penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan sekolah. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada kepala sekolah, guru, dan siswa guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan dokumen seperti tata tertib sekolah, kurikulum, program pendidikan karakter, serta arsip lain yang berkaitan dengan penelitian (Dewi et al., 2025).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan secara langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data. Untuk membantu proses penelitian, digunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data sesuai tujuan penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami, kemudian dilakukan

penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, guru, dan siswa, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member check kepada informan untuk memastikan bahwa data dan interpretasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

C. Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 5 Kota Sorong menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia memiliki tingkat yang beragam pada setiap jenjang kelas. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta siswa kelas VII, VIII, dan IX, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar siswa telah mengenal konsep hak dan kewajiban secara teoritis, tetapi belum sepenuhnya mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman siswa masih dominan berada pada tingkat hafalan dan belum seluruhnya sampai pada tahap penghayatan maupun kesadaran moral sebagai warga negara. Guru PPKn menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran siswa mampu menyebutkan definisi hak dan kewajiban sesuai materi buku pelajaran, namun mereka masih mengalami kesulitan ketika diminta memberikan contoh nyata dalam kehidupan bermasyarakat maupun di lingkungan sekolah. Guru PPKn menyampaikan bahwa “siswa umumnya mudah menghafal definisi hak dan kewajiban secara tekstual dari buku, tetapi mereka mengalami kesulitan ketika diminta menjelaskan hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa

pemahaman siswa masih bersifat teoritis dan belum sepenuhnya kontekstual.

Kepala sekolah juga menjelaskan bahwa pihak sekolah telah berupaya menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan melalui berbagai program pembiasaan karakter dan budaya sekolah. Menurut kepala sekolah, sekolah secara rutin melaksanakan kegiatan upacara bendera, kerja bakti, pembinaan disiplin, serta kegiatan organisasi siswa untuk membentuk kesadaran tanggung jawab dan kedisiplinan siswa. Kepala sekolah menyampaikan bahwa “melalui kegiatan sekolah, siswa diharapkan tidak hanya belajar secara akademik, tetapi juga belajar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.” Namun demikian, beliau mengakui bahwa masih terdapat beberapa siswa yang belum mampu menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari masih adanya siswa yang datang terlambat ke sekolah, tidak memakai seragam lengkap, kurang menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan tidak disiplin selama proses pembelajaran berlangsung.

Hasil wawancara dengan siswa kelas VII menunjukkan bahwa sebagian siswa masih memiliki pemahaman yang sangat sederhana mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Salah satu siswa menyampaikan bahwa hak warga negara adalah “hak untuk sekolah dan mendapatkan pelajaran.” Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kewajiban sebagai warga negara, siswa tersebut menjawab bahwa kewajiban adalah “belajar dan menaati aturan sekolah.” Jawaban tersebut menunjukkan bahwa siswa masih memahami hak dan kewajiban dalam ruang lingkup yang sempit dan belum mampu menghubungkannya dengan kehidupan sosial yang lebih luas. Selain itu, terdapat siswa yang mengaku belum terlalu memahami konsep hak dan kewajiban karena kurang mendapatkan penjelasan di rumah. Salah satu siswa menyatakan bahwa “di rumah bapak dan mama jarang bicara tentang hak dan

kewajiban warga negara.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan pemahaman awal siswa mengenai nilai-nilai kewarganegaraan.

Sebaliknya, terdapat beberapa siswa kelas VII yang menunjukkan pemahaman lebih baik dibandingkan teman-temannya. Salah satu siswa mampu menjelaskan bahwa hak warga negara meliputi hak memperoleh pendidikan, hak menyampaikan pendapat, dan hak mendapatkan perlakuan yang adil. Siswa tersebut mengatakan bahwa “setiap orang punya hak untuk sekolah dan berbicara, tapi juga harus menghormati orang lain.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian siswa mulai memahami adanya hubungan antara hak pribadi dan penghormatan terhadap hak orang lain. Namun demikian, jumlah siswa yang memiliki pemahaman seperti ini masih relatif sedikit dibandingkan siswa yang hanya memahami konsep secara hafalan.

Pada siswa kelas VIII, hasil wawancara menunjukkan adanya perkembangan pemahaman yang lebih baik dibandingkan siswa kelas VII. Sebagian besar siswa kelas VIII sudah mampu menjelaskan hubungan antara hak dan kewajiban secara lebih seimbang. Salah satu siswa menyampaikan bahwa “kalau kita ingin mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu.” Siswa tersebut memberikan contoh bahwa siswa memiliki hak memperoleh pendidikan dan kenyamanan belajar, tetapi juga memiliki kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan sekolah, dan menghormati guru maupun teman. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian siswa telah mulai memahami konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain itu, siswa kelas VIII juga mulai menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya menghormati hak orang lain. Salah satu siswa menyampaikan bahwa ketika teman sedang

berbicara atau menyampaikan pendapat, maka siswa lain harus menghargai dan mendengarkan dengan baik. Siswa tersebut mengatakan bahwa “kalau teman bicara di depan kelas, kita harus mendengarkan dan tidak mengejek.” Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perkembangan moral dan sosial siswa dalam memahami pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap hak orang lain di lingkungan sekolah.

Hasil wawancara dengan siswa kelas IX menunjukkan bahwa sebagian besar siswa pada jenjang ini memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan siswa kelas VII dan VIII. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman belajar yang lebih lama dalam mata pelajaran PPKn serta keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sekolah. Salah satu siswa kelas IX menjelaskan bahwa hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang agar kehidupan di sekolah maupun masyarakat dapat berjalan dengan baik. Menurut siswa tersebut, “kalau kita hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, maka kehidupan tidak akan tertib.” Siswa tersebut juga memberikan contoh bahwa siswa memiliki hak mendapatkan kenyamanan belajar, tetapi juga berkewajiban menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah.

Walaupun pemahaman siswa kelas IX lebih baik, hasil observasi menunjukkan bahwa pemahaman tersebut belum selalu diwujudkan dalam perilaku nyata. Masih ditemukan siswa yang datang terlambat, tidak memakai atribut lengkap, bermain saat guru menjelaskan, serta membuang sampah sembarangan. Ketika diwawancarai mengenai alasan melakukan pelanggaran tersebut, beberapa siswa mengaku kurang disiplin dalam mengatur waktu dan sering mengikuti perilaku teman. Salah satu siswa mengatakan bahwa “kadang terlambat karena tidur terlalu malam dan bangun kesiangan.” Sementara siswa lain mengatakan bahwa “kalau teman-teman tidak masuk kelas, kadang ikut juga.” Pernyataan tersebut

menunjukkan bahwa pengaruh kebiasaan pribadi dan lingkungan pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku siswa dalam melaksanakan kewajibannya.

Guru PPKn menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam pembelajaran kewarganegaraan adalah membentuk kesadaran siswa agar melaksanakan kewajiban bukan karena takut hukuman, melainkan karena kesadaran moral dan tanggung jawab sebagai warga negara. Guru menyampaikan bahwa “beberapa siswa mematuhi aturan hanya karena takut dihukum guru, bukan karena kesadaran dari diri sendiri.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai kewajiban belum terbentuk secara mendalam pada sebagian siswa. Pendidikan kewarganegaraan seharusnya tidak hanya mengajarkan aturan secara teoritis, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran sosial siswa melalui pembiasaan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lingkungan sekolah memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban. Sekolah yang memiliki budaya disiplin, kerja sama, dan penghargaan terhadap pendapat siswa cenderung mampu membentuk kesadaran kewarganegaraan yang lebih baik. Di SMP Negeri 5 Kota Sorong, guru-guru telah berupaya menanamkan nilai tanggung jawab melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan pembiasaan. Salah satu guru menyampaikan bahwa “setiap pagi siswa dibiasakan datang tepat waktu dan mengikuti doa serta apel pagi supaya mereka belajar disiplin.” Selain itu, sekolah juga melaksanakan kegiatan kerja bakti untuk membentuk kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah. Salah satu siswa mengatakan bahwa “kalau ikut kerja bakti jadi belajar menjaga kebersihan dan bekerja sama dengan teman.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembiasaan di sekolah dapat membantu siswa

memahami kewajiban melalui pengalaman langsung.

Dalam proses pembelajaran di kelas, guru PPKn menggunakan beberapa metode seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus untuk membantu siswa memahami materi secara lebih kontekstual. Guru menjelaskan bahwa metode diskusi lebih efektif dibandingkan metode ceramah karena siswa menjadi lebih aktif dalam menyampaikan pendapat. Guru menyampaikan bahwa “ketika diskusi kelompok, siswa lebih berani berbicara dan mulai belajar menghargai pendapat teman.” Akan tetapi, guru juga mengakui bahwa tidak semua siswa memiliki keberanian yang sama untuk berbicara di depan kelas. Sebagian siswa masih merasa malu dan takut salah ketika menyampaikan pendapat. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya belajar yang masih berpusat pada guru menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.

Selain faktor sekolah, lingkungan keluarga juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban. Siswa yang berasal dari keluarga dengan pola komunikasi yang baik cenderung memiliki tingkat disiplin dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Orang tua yang memberikan perhatian terhadap pendidikan anak serta memberikan contoh perilaku yang baik membantu membentuk kesadaran kewarganegaraan siswa. Salah satu siswa mengatakan bahwa “orang tua selalu mengingatkan supaya menghormati guru dan tidak melanggar aturan sekolah.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang sangat memengaruhi pembentukan karakter siswa.

Sebaliknya, siswa yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarga cenderung memiliki tingkat disiplin yang lebih rendah. Guru PPKn menjelaskan bahwa beberapa siswa yang sering melanggar aturan sekolah berasal dari lingkungan keluarga

yang kurang memberikan pengawasan terhadap anak. Guru menyampaikan bahwa “ada siswa yang kurang diperhatikan di rumah sehingga perilakunya di sekolah juga kurang disiplin.” Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran kewarganegaraan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Pengaruh teman sebaya juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku siswa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Beberapa siswa mengaku lebih mudah mengikuti kebiasaan teman dibandingkan nasihat guru atau orang tua. Salah satu siswa mengatakan bahwa “kalau teman-teman melanggar aturan, kadang ikut juga supaya tidak dianggap berbeda.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku siswa. Jika siswa berada dalam lingkungan pergaulan yang positif, maka mereka cenderung terdorong untuk berperilaku disiplin dan bertanggung jawab. Sebaliknya, apabila lingkungan pergaulan cenderung negatif, maka siswa lebih mudah terpengaruh melakukan pelanggaran.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian siswa mulai memahami pentingnya hak menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokratis di sekolah. Hal ini terlihat ketika beberapa siswa aktif dalam kegiatan organisasi dan diskusi kelas. Salah satu siswa menyampaikan bahwa “di organisasi sekolah kami belajar menyampaikan pendapat dan bekerja sama.” Kegiatan organisasi memberikan pengalaman nyata kepada siswa mengenai pentingnya partisipasi, tanggung jawab, dan kerja sama dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pembelajaran kewarganegaraan tidak hanya diperoleh melalui teori di kelas, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam kegiatan sekolah (Ningsih & Paramitha, 2025).

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa hubungan antara guru dan siswa di

sekolah cukup baik. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan bagi siswa. Beberapa siswa mengatakan bahwa guru sering memberikan nasihat tentang pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan menghormati orang lain. Salah satu siswa menyampaikan bahwa “guru sering mengingatkan supaya kami menjaga sikap dan menghargai teman.” Hal tersebut menunjukkan bahwa keteladanan guru memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter siswa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar siswa telah memahami konsep dasar hak dan kewajiban secara teoritis, tetapi belum seluruhnya mampu menerapkannya secara konsisten dalam perilaku nyata. Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman siswa meliputi lingkungan keluarga, budaya sekolah, metode pembelajaran, pengaruh teman sebaya, dan perkembangan moral siswa. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara sekolah, guru, keluarga, dan masyarakat untuk membentuk kesadaran kewarganegaraan siswa secara lebih menyeluruh (Rahmawati et al., 2024).

Pembelajaran PPKn perlu dirancang lebih kontekstual dan partisipatif agar siswa tidak hanya memahami konsep secara hafalan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Susilawati et al., 2025). Guru perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi siswa untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan (Prayoga et al., 2025). Selain itu, sekolah juga perlu memperkuat budaya disiplin dan pembiasaan karakter melalui kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung. Dengan pembelajaran yang lebih aktif dan berbasis pengalaman, siswa

diharapkan mampu memahami bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab (Bhoki et al., 2025).

D. Penutup dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 5 Kota Sorong, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia masih berada pada tingkat yang beragam. Sebagian besar siswa telah memahami konsep dasar hak dan kewajiban secara teoritis melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), seperti hak memperoleh pendidikan, hak menyampaikan pendapat, serta kewajiban menaati aturan sekolah dan menghormati guru. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku nyata di kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari masih adanya siswa yang kurang disiplin, datang terlambat ke sekolah, tidak mematuhi tata tertib, serta kurang menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan keluarga, budaya sekolah, metode pembelajaran, dan pengaruh teman sebaya. Siswa yang mendapatkan perhatian dan pembinaan dari keluarga cenderung memiliki pemahaman serta sikap tanggung jawab yang lebih baik dibandingkan siswa yang kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua. Selain itu, sekolah juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter kewarganegaraan siswa melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan disiplin, upacara bendera, kerja bakti, dan kegiatan organisasi sekolah.

Guru PPKn berperan tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan bagi siswa dalam menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Namun demikian, proses pembelajaran masih menghadapi kendala karena sebagian siswa belum memiliki keberanian menyampaikan pendapat dan masih memahami materi secara hafalan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia perlu terus ditingkatkan melalui pembelajaran yang lebih kontekstual, aktif, dan berbasis pengalaman. Kerja sama antara sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat sangat diperlukan agar siswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arne, M. L. (2025). *Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Rasa Nasionalisme di Smp 4 Kota Sorong*. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 198–234.
- Bhoki, H., Are, T., & Ola, M. I. D. (2025). *Membentuk karakter siswa melalui budaya positif sekolah*. CV. Ruang Tentor.
- Budimansyah, D. (2008). *PKn dan masyarakat multikultural*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, Universitas
- Daryanto, S. D. (2013). Implementasi pendidikan karakter di sekolah. *Yogyakarta: Gava Media*.
- Dewi, N. P. A. P., Landrawan, I. W., & Kertih, I. W. (2025). Implementasi pendidikan karakter dalam membentuk sikap disiplin pada pembelajaran PPKn: Studi evaluasi Kurikulum Merdeka. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 535–544.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Murdiansyah, E. B., Jasrudin, J., Ali, M., & Hariyadi, S. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam Pembelajaran Kewarganegaraan: Kajian Kualitatif Deskriptif di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 5(3).
- Narwanti, S. (2011). Pendidikan Karakter Pengintergrasian Nilai Pembentukan Karakter. *Jakarta Familia*, 14.
- Ningsih, S. A. E., & Paramitha, V. S. (2025). Studi Partisipasi Siswa Dalam Kegiatan OSIS Sebagai Pembelajaran Kewarganegaraan Di SMA Negeri 3 Mataram. *Educational Note*, 1(1), 31–37.
- Nur, M., Yasriuddin, Y., & Azijah, N. (2022). Identifikasi Perilaku Bullying Di Sekolah (Sebuah Upaya Preventif). *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 685. <https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1054>
- Prayoga, M. D., Kurniasari, D., Finatalia, L., & Wiranata, I. H. (2025). Peran Guru PPKN dalam Membentuk Warga Negara Demokratis di Era Digital. *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran)*, 8, 788–803.
- Rahmawati, F., Rahmawati, R., & Hestiningtyas, W. (2024). Pengaruh Lingkungan Sekolah, Keluarga, dan Teman Sebaya terhadap Hasil Belajar Siswa MTs: Pendekatan Kuantitatif dengan Analisis Simultan. *Journal of Social Science Education*, 5(2), 96–101.
- Safira, A. (2025). PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ROLE PLAYING PADA MATERI HAK DAN KEWAJIBAN UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DI KELAS XII-2 SMA NEGERI 1 RANTAU SELATAN. *PeTeKa*, 8(3), 923–930.
- Suriani, N., & Jailani, M. S. (2023). Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36.
- Susilawati, L. P., Sanjaya, D. B., & Suastika, I. N. (2025). Pembelajaran PKN Berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 9(2), 234–241.
- Syuhud Mujahada, K., & Rohmatullah, D. M. (2025). Penerapan Nilai Karakter Dalam Pendidikan Kmi Gontor: Analisis Prinsip Efektif Lickona (Cep). *Journal of Islamic Education Sinta*, 5(10), 136–157. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/QuranicEdu>
- Tutik, T. T. (2018). Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional. *Al-Daulah: Jurnal*

Hukum Dan Perundangan Islam, 8(2), 373–398.
Yusanto, Y. (2020). Ragam pendekatan penelitian

kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1).